

B. 3

Volume 4, Nomor 2, Januari 2004

ISSN 1412 – 1557

PELANGI PENDIDIKAN

Majalah Ilmiah Kependidikan

Eksperimentasi Pembelajaran
IPA di SD dengan
Menggunakan Metode
Demonstrasi

Pemanfaatan Lingkungan
sebagai Sumber Belajar di
Sekolah Dasar

Kurikulum
Berbasis
Kompetensi
Konsep

Pengembangan
Kreativitas Siswa
Sekolah Dasar Melalui
Kegiatan B

Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja,

Kurikulum Baru untuk Pendidikan Anak Luar
Biasa: Bukti Nyata
Mengangkat Derajat Anak Berkelainan,

Peran Guru dalam Penyelamatan Sumber Daya Alam Hayati

Pendidikan Bahasa
Indonesia di Sekolah
Dasar

Kekuasaan dalam
Kepemimpinan Kepala
Sekolah



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
CATUR SAKTI BANTUL YOGYAKARTA

Pelangi Pendidikan	Volume 4	Nomor 2	Halaman 1-80	Yogyakarta Januari 2004	ISSN 1412 – 1557
-----------------------	----------	---------	-----------------	----------------------------	---------------------

Kurikulum Berbasis Kompetensi : KONSEP DAN PENGEMBANGANNYA

Oleh : H. Sujati

Pendahuluan

Keberhasilan besar selama pemerintahan Orde Baru dalam pembangunan bidang pendidikan secara kuantitatif mampu membangun sarana dan prasarana pensisipan dalam jumlah sangat besar, menambah jumlah guru menambah fasilitas pendidikan, mengurangi secara drastis jumlah warga buta huruf, dan meningkatkan partisipasi anak usia sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 1984 Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berhasil mengantaskan pendidikan anak-anak usia Sekolah Dasar dengan program wajib belajar enam tahun.

Program ini memiliki idealisme, semua anak usia SLTP dapat mengenyam pendidikan di sekolah formal. Program dipandang berhasil secara kuantitatif, minat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi meningkat tajam. Karena keberhasilan program ini, Indonesia pernah mendapat anugerah penghormatan dari UNESCO. Indonesia termasuk salah satu negara yang sukses mengkampanyekan program pendidikan untuk semua atau *education for all*.

Namun, di balik berbagai keberhasilan di atas, ada satu duka mendalam dalam dunia pendidikan kita yang perlu mendapatkan

perhatian, yakni pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas anak bangsa. Bahkan ada kecenderungan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita semakin mengalami penurunan dan kondisi moral bangsa kian terpuruk. Dalam memperebutkan pasaran kerja global, bangsa kita berada pada peringkat bawah. Keluar negeri, negara kita bukan mengirimkan tenaga kerja ahli profesional, melainkan mengirimkan tenaga kasar sebagai buruh dan pelayan rumah tangga. Kita menyaksikan melalui media elektronik ribuan warga negara kita diburu polisi, dicambuk rotan, dimasukkan penjara, dan dideportasi karena tertangkap sebagai buruh gelap di negeri orang. Bagi tenaga kerja wanita, kita juga menyaksikan banyak warga kita yang diperlakukan secara tidak adil di negeri asing dengan tanpa mendapatkan perlindungan secara memadai dari pemerintah. Mereka disiksa, diancam hukum pancung, diperkosa oleh majikan, dipekerjakan tanpa gaji, ditiduih mencuri, dan sebagainya. Sementara di dalam negeri, kita melihat semakin banyak terjadi perdagangan wanita untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Ini semua terjadi karena *human development index* (HDI) kita

lemah. *United Nations Development Project* (UNDP) pada tahun 2000 melaporkan bahwa HDI kita pada tahun 1998 pada peringkat 102 dari 174 negara dan pada tahun 2000 berada pada peringkat 109. Sementara kita melihat negara-negara tetangga, justru mengalami peningkatan. Singapura misalnya, dari urutan 34 ke 24, Australia dari 11 ke 4, Filipina dari 95 ke 64, Vietnam dari 121 ke 108 (Hafid Abbas, 2003).

Dilihat dari sudut pelanggaran hak asasi manusia, negara kita termasuk menduduki peringkat atas. Tidak terhitung berapa banyak warga negara kita yang mati atau cidera karena bertikai dengan sesama warga negara di berbagai daerah konflik, seperti di Kalimantan Barat, Poso, Ambon, Papua dan Aceh. Mereka bertikai dengan latar belakang politik maupun SARA. Sampai sekarang kita juga tidak mengetahui berapa banyak orang yang hilang diculik oleh orang tidak kenal dan mungkin mereka sudah dibunuh dengan latar belakang politik. Dalam layar televisi kita masih sering menyaksikan tayangan sejumlah ibu berdemo di depan kantor KONMASHAM dengan membawa foto anaknya yang diculik beberapa tahun lalu, hingga kini belum mengetahui rimbanya. Pada tahun 1998 kita juga menyaksikan ratusan WNI keturunan Cina diperkosa orang yang mabuk reformasi. Pada tahun 2000 sampai 2002 kita juga melihat terjadinya pembakaran sejumlah tempat ibadah dengan motif

untuk mengadu domba antarumat beragama. Negara kita dikenal sebagai negara yang kurang menghargai hak hidup kelompok minoritas (Anonim, 2003a). negara kita sampai sekarang masih dikenai embargo persenjataan oleh negara tertentu karena dinilai kurang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Satu pernyataan yang pernah dilontarkan oleh mantan perdana menteri Singapura> Indonesia merupakan sarang teroris. Kondisi demikian menurut Hafid Abbas (2003) menggambarkan bahwa pendidikan di Indonesia belum berhasil mendidik anak bangsa yang mampu menghargai perbedaan dan hidup bersama orang lain, serta bertoleransi tinggi terhadap berbagai aspek keragaman. Pendidikan kita secara nasional gagal mendidik anak bangsa menjadi peserta didik yang beradab dan berakhlak mulia. Menurut Driyakarya (1979), pendidikan yang demikian bukan proses humanisasi, melainkan sebaliknya sebagai dehumanisasi.

Pada tahun 1999 suatu badan yang disebut *The Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong melakukan penelitian tentang tingkat korupsi dari sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia. Hasil penelitian itu dituangkan dalam suatu skor yang bergerak dari 1,00-10,00. Semakin kecil skor tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut semakin bersih dari korupsi. Hasil penelitian itu sungguh mengejutkan, Indonesia memiliki skor hampir sempurna, yakni

9,91 dan dinyatakan sebagai negara yang terkorup di Asia. Pada level dunia, kita menduduki peringkat ke-2 (Hafid Abbas, 2003). Sementara itu Departemen Agama yang selama ini dipandang sebagai salah satu departemen benteng moral bangsa juga tidak luput dari tindak korupsi (Hamdan Daulay, 2003). Fakta ini sungguh berlawanan dengan pengakuan yang kita yakini selama ini, yakni bangsa kita sebagai bangsa agamis dan religius, yang selalu memegang nilai-nilai kejujuran. Hal yang demikian mencerminkan bahwa pendidikan nasional kita belum mampu membentuk manusia yang berintegritas moral tinggi.

Dilihat secara sistemik, *outcomes* pendidikan merupakan hasil dari proses pendidikan. Kulitas proses pendidikan dipengaruhi oleh banyak variabel. Salah satu variabel yang secara signifikan mempengaruhi proses pendidikan tersebut adalah kurikulum. Seberapa besar kurikulum memberikan sumbangan terhadap kualitas lulusan pendidikan, sampai pada saat ini penulis belum pernah menemukan suatu referensi yang memadai. Satu hal yang pasti, kita pernah menggunakan berbagai macam kurikulum berskala nasional, mulai dari kurikulum 1968 hingga 1994.

Berdasarkan pengamatan yang cermat kondisi pendidikan di Indonesia, badan internasional yang mengurus pendidikan, yakni UNESCO merekomendasikan empat pilar pembaharuan pendidikan.

Keempat pilar itu adalah: *learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together*. Sasaran akhir keempat pilar itu adalah agar pada akhir proses pendidikan para peserta didik memiliki keterampilan untuk hidup atau *life skills*. Karena pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Depdiknas sangat *respect* terhadap himbauan tersebut, mulai tahun 2004 ini diharapkan semua lembaga pendidikan formal dari berbagai jenis dan jenjang sudah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Dalam keseluruhan sistem pendidikan, kurikulum memegang peranan penting. Di kurikulum tergambar tujuan institusional yang akan dicapai, bahan ajar, cara menyampaikan, dan cara mengevaluasi pencapaian tujuan. Kualitas lulusan pendidikan sangat tergantung pada kualitas kurikulum. Untuk menggambarkan penting kurikulum dalam proses pendidikan, Zais (dalam Mohd. Ansyar dan Nurtain, 1993) menyatakan bahwa kurikulum merupakan alat untuk menjadikan peserta didik seperti yang diinginkan. Tanpa kurikulum, sulit bagi perencanaan dan praktisi pendidikan untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan pendidikan pada lembaganya. Permasalahannya, apakah secara konseptual KBK sudah dipahami oleh para praktisi dan birokrasi pendidikan? Melalui tulisan ini penulis akan memaparkan konsep kurikulum berbasis kompetensi dan pengembangannya.

Konsep KBK

Dari sudut pandang terminologi, terdapat dua kata yang perlu dicermati, yakni kurikulum dan kompetensi. Oleh karena itu, dalam makalah ini pertama akan dibahas mengenai pengertian kurikulum, berikutnya kompetensi, dan berbasis kompetensi.

Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai pengertian kurikulum. Pandangan lama menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat mata pelajaran dan materi pelajaran yang harus diajarkan oleh guru kepada peserta didik (Mohd. Ansyar dan Nurtain, 1993). Sementara itu, Oliver (dalam Brown and Brown, 1985:24) memberikan tiga macam definisi kurikulum, yakni (1) *All the experiences a child has under the guidance of a school*, (2) *All the courses or subjects which of the school offers*, dan (3) *The systematic arrangement of subject matter activities within a course offered by school*.

Ada ahli yang menganggap bahwa kurikulum merupakan suatu kegiatan, ada pula yang menyebut bahwa kurikulum merupakan penggabungan antara kegiatan dan bahan ajar. Sementara itu ada juga yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi hasil belajar. Bahkan, ada sesuatu yang tidak dengan sengaja kita rancang, tetapi secara nyata hal itu berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Itulah yang disebut

dengan *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi) yang dibedakan dengan *written curriculum* (kurikulum tertulis) (Ari Subagyo, 2003). Beane (dalam Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000) membagi kurikulum dalam empat jenis, yaitu: (1) kurikulum sebagai produk, (2) kurikulum sebagai program, (3) kurikulum sebagai hasil belajar yang diinginkan, dan (4) kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa. Pemahaman yang benar tentang arti kurikulum ini sangat penting, karena akan menentukan arah proses pembelajaran.

Said Hamid Hasan (1988) melihat kurikulum dalam empat sudut pandang, yakni kurikulum sebagai ide, rencana tertulis, kegiatan, dan hasil belajar. Sementara Hilda Taba berpendapat bahwa rumusan kurikulum yang terlalu luas justru akan mengaburkan pengertian kurikulum itu sendiri dan menghalangi pemikiran yang tajam tentang kurikulum. Secara singkat Hilda Taba (dalam Nasution, 1993:10) merumuskan kurikulum sebagai *a plan of learning*, yakni sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari siswa. Kurikulum sebagai suatu rencana juga dikemukakan oleh Mendikbud Republik Indonesia. Menurut SK Mendikbud NO. 056/U/1994, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman proses

penyelenggaraan belajar mengajar di perguruan tinggi.

Pendapat-pendapat yang muncul belakangan telah beralih dari penekanan pada isi menjadi lebih pada pengalaman belajar. Secara rinci Tilaar (2002:364) mendefinisikan kurikulum sebagai sejumlah informasi dan pengalaman yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Suatu pandangan yang memiliki kemiripan dikemukakan oleh Campbell dan Caswel seperti dikutip oleh Nana Syaodih Sukmadinata (1997:4) menyatakan : *curriculum ... to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers*. Sementara itu menurut Doll (dalam Nana Syaodih Sukmadinata, 1977) perluasan makna kurikulum bukan saja dari aspek isi ke proses, tetapi diperluas lagi. Berbagai upaya yang dilakukan guru dalam mendorong terjadinya pengalaman dan setiap fasilitas yang mendukungnya pun dapat dimasukkan dalam pengertian kurikulum.

Pengertian kurikulum yang menyangkut kegiatan, secara lebih luas dikemukakan oleh Galen Saylor dan William M. Alexander (dalam Nasution, 1980:7). Ada dua ahli yang menyatakan bahwa *Curriculum is the sum total of school's efforts to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school*. Dengan demikian setiap usaha yang dilakukan sekolah untuk mempengaruhi anak agar belajar

yang terjadi di dalam maupun di luar sekolah termasuk kurikulum.

Mauritz Johnson (dalam Nana Syaodih Sukmadinata, 1997) menyatakan keberatan terhadap rumusan kurikulum yang terlalu luas seperti yang dikemukakan Doll di atas. Menurut Mauritz Johnson pengalaman hanya akan terjadi jika siswa berinteraksi dengan lingkungan (alam, benda, gagasan orang). Interaksi seperti itu menurutnya bukan kurikulum, melainkan pengajaran. Kurikulum hanya berkenaan dengan hasil-hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai. Sementara itu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi termasuk dalam pengajaran. Dengan demikian Mauritz Johnson membedakan secara tegas antara kurikulum dengan pengajaran.

Lain pula menurut Mc Donald (dalam Nana Syaodih Sukmadinata, 1997), yang menyatakan bahwa sistem persekolahan dapat dibedakan menjadi empat subsistem, yaitu: mengajar, belajar, pembelajaran, dan kurikulum. Mengajar merupakan perlakuan profesional yang diberikan guru. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran merupakan keseluruhan pertautan kegiatan yang terjadi sebagai akibat kegiatan mengajar dan belajar. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses belajar mengajar.

Menuth Beauchamp (dalam Nana Syaodih Sukmadinata, 1997) kurikulum merupakan rencana pengajaran dan juga merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat pengajaran, dan jadwal waktu pengajaran. Sebagai suatu sistem, kurikulum merupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah.

Saylor, dkk (dalam Karim A. Karhami, 2000) memandang kurikulum dalam empat esensi, yakni sebagai tujuan, kesempatan yang terencana, mata pelajaran atau mata kuliah, dan kurikulum sebagai pengalaman. Sementara itu pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.

Berdasarkan berbagai definisi di atas diketahui bahwa sampai sekarang masih terdapat penafsiran yang berbeda tentang pengertian kurikulum. Ada yang berpendapat bahwa kurikulum merupakan perencanaan, tetapi ada pula yang menganggap bahwa kurikulum merupakan suatu kegiatan atau proses. Di sisi lain ada pula yang menganggap bahwa kurikulum merupakan suatu produk. Meskipun terdapat berbagai perbedaan pengertian, pada dasarnya

kurikulum dapat dipandang sebagai subsistem yang bersama subsistem yang lain berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kurikulum merupakan sekumpulan bahan ajar yang dirancang secara sistematis untuk menghantarkan peserta didik kepada suatu pengalaman.

Sama halnya dengan kurikulum, definisi kompetensi pun beragam. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kompetensi mempunyai kesamaan arti dengan kemampuan, kewenangan, dan kekuasaan untuk memutuskan sesuatu. Sementara dalam *Encyclopedia of Psychology* dinyatakan *There appear to be three components to a definition of competence. The first related to having suitable abilities and skill; the second, to being legally qualified; and the third, to whether an individual's expertise entitles that individual to belong to a professional*" (Corsini, 1987:224).

Dalam terminologi kurikulum, kompetensi berarti kemampuan yang harus dicapai siswa yang bersifat komprehensif, baik yang berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lain-lain (Muchson, 2003). Mc Ashan (dalam Mulyasa, 2002) mengartikan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Crunkilton

(dalam Mulyasa, 2002). Menurutnya, kompetensi diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas tersebut. Sementara Depdiknas (2002) mengartikan kompetensi sebagai pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi mendeskripsikan proses belajar yang harus dilalui oleh seseorang untuk menjadi kompeten. Kompetensi merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, dan dilakukan siswa. Hall dan Jones (dalam Mukminan, 2003) menyatakan bahwa kompetensi merupakan pernyataan yang menggambarkan penampilan kemampuan yang dapat diamati dan diukur. Dalam kaitan dengan lembaga pendidikan, Djemari Mardapi (2003) menyatakan bahwa kompetensi lulusan merupakan apa yang dapat dilakukan atau didemonstrasikan seseorang setelah dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan. Gordon (dalam Mulyasa, 2002) menyatakan bahwa kompetensi meliputi dimensi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat.

Dari berbagai pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang berdimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang sudah menjadi milik individu. Kemampuan tersebut tercermin dalam kebiasaan berpikir

dan bertindak seseorang. Kemampuan tersebut dapat diukur dan diamati.

Berdasarkan dua kajian di atas tentang kurikulum dan kompetensi, dapat dirumuskan pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Anif Gufron (2003) mengartikan kurikulum berbasis kompetensi sebagai seperangkat rencana dan pengaturan tentang seperangkat kemampuan yang harus dipelajari, dikuasai, dan ditampilkan oleh peserta didik yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Depdiknas (2002) menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat standar program pendidikan yang mengantarkan anak didik untuk menjadi kompeten dalam berbagai kehidupan yang dipelajari. Penulis sendiri merumuskan kurikulum berbasis kompetensi merupakan program pengajaran yang mendasarkan diri pada kemampuan apa yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program studi.

Menurut Depdiknas (2002), kurikulum berbasis kompetensi memiliki berbagai karakteristik, yaitu: (1) menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, (2) berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*), dan keberagaman, (3) penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, (4) guru bukan satu-satunya sumber belajar, (5) penilaian pada proses dan hasil dalam upaya

mengukur pencapaian suatu kompetensi, dan (6) dikembangkan berbagai model penilaian, seperti portofolio, penilaian berbasis kelas, dan penilaian autentik. Mulyasa (2002) mengidentifikasi sejumlah karakter kurikulum berbasis kompetensi: (1) sistem belajar menggunakan modul, (2) menggunakan keseluruhan sumber belajar, (3) pengalaman lapangan, (4) strategi individual personal, (5) kemudahan belajar, dan (6) belajar tuntas.

Perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi, menurut Mulyasa (2002) berdasarkan diri pada sejumlah asumsi. *Pertama*, banyak sekolah yang memiliki sedikit guru yang profesional dan tidak mampu melaksanakan pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu, penerapan KBK memerlukan peningkatan kemampuan profesional guru. *Ke dua*, banyak sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran saja, sehingga mengajar hanya diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi pelajaran. *Ke tiga*, adanya anggapan bahwa anak bagaikan botol kosong yang siap diisi. Kenyataannyasiswa sudah memiliki pengetahuan dan mampu menemukan sendiri pengetahuan baru. Oleh karena itu, kurikulum berbasis kompetensi hanya dapat terlaksana dalam pembelajaran yang *konstruktivistik dan kontekstual*. *Ke empat*, peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda dalam waktu menyelesaikannya saja. Oleh karena itu, KBK hanya dapat

berjalan baik jika pengajaran remedial juga berjalan baik, sehingga setiap siswa dapat menuntaskan program pendidikan. *Ke lima*, mengajar berarti mengkondisikan lingkungan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi secara optimal.

Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan bagian esensial dari pembaharuan pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai bukan semata-mata memproduksi bahan pengajaran, melainkan lebih dari itu, yakni meningkatkan kualitas pendidikan (Achasisius Kabir, 1988). Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (1997) istilah pengembangan kurikulum dapat disepadankan dengan penyempurnaan kurikulum. Nasution (1980) tidak menggunakan istilah pengembangan atau penyempurnaan kurikulum, tetapi perbaikan dan perubahan kurikulum. Perbaikan kurikulum biasanya hanya menyangkut suatu aspek dari kurikulum, misalnya metode, alat peraga, buku ajar, dengan tetap menggunakan istilah kurikulum yang berlaku. Sementara itu, perubahan kurikulum berkait dengan perubahan dasar-dasar, baik mengenai tujuan, alat, maupun metode untuk mencapai tujuan. Perubahan kurikulum juga berarti perubahan manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, perubahan kurikulum sering juga dianggap sebagai *social change* atau perubahan sosial.

Perubahan kurikulum ini oleh Nasution sering juga disebut pembaharuan atau inovasi kurikulum.

Menurut Mulyasa (2002) pengembangan kurikulum mempunyai arti luas. *Pertama*, pengembangan kurikulum mempunyai kesamaan arti dengan penyusunan kurikulum baru. *Ke dua*, pengembangan kurikulum dapat berarti penyempurnaan terhadap kurikulum yang sedang berlaku.

Beane, Toepfer, dan Allesli (dalam Akhasius Kaber, 1988:75) mengartikan pengembangan kurikulum sebagai suatu proses di mana partisipan pada berbagai tingkatan membuat keputusan tentang tujuan, tentang bagaimana tujuan dapat direalisasikan melalui kegiatan belajar mengajar, dan apakah tujuan dan alat itu serasi atau efektif? Menurut pandangan penulis, definisi ke dua lebih mudah dimengerti maksudnyadari pada definisi pertama. Definisi ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, tetapi harus juga melibatkan ilmuwan (baca: ahli krk dan pendidikan), masyarakat pengguna lulusan, siswa, dan guru. Tilaar (2002) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum harus ditempatkan dalam kerangka *stake holder society*, di mana para pesaham pendidikan harus ikut dilibatkan dalam pengembangan kurikulum. Kita harus menghindarkan diri dari

kurikulum yang beku, tidak dinamis, karena berakar dari masyarakat. Menurut Karim A. Karhani (2000) kelemahan pengembangan kurikulum gaya lama adalah terlalu didominasi oleh pertimbangan keilmuan, mengedepankan kerja para pakar. Cara pengembangan yang demikian menurut Karim bersifat *illogical process*.

Para pemikir pendidikan, seperti John Dewey dan Hilba Taba sebenarnya sudah mengajukan suatu ide bagaimana kita harus mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan tiga aspek, yakni : (1) *the study of society*, (2) *the study of learners* (3) *the study of subject matter* (Karim A. Karhani, 2000).

Terkait dengan perkembangan kurikulum, Mulyani Sumantri (1998) merekomendasikan perlunya dibentuk suatu komite yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap pendidikan, para tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan perlu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum. Orang tua siswa, guru, bahkan peserta didik itu sendiri perlu diikutsertakan.

Pada waktu-waktu yang lalu, penetapan berbagai keputusan, termasuk dalam hal kurikulum dilakukan oleh administrator pendidikan. Tetapi pada zaman sekarang seharusnya melibatkan warga atau para tokoh masyarakat (termasuk orang tua siswa). Asumsinya, penyelenggaraan

kurikulum pendidikan tidak pernah dapat lepas dari masyarakat. Warga masyarakat merupakan pendukung dana dan sebagai terhadap aktivitas belajar anaknya sebagai respon terhadap kurikulum.

Untuk melibatkan warga masyarakat dalam pengembangan kurikulum, mereka perlu diundang untuk menyelenggarakan pertemuan atau rapat. Dalam pertemuan seperti itu, para ahli kurikulum dan pendidikan memberi penjelasan tentang rencana perubahan kurikulum dan pentingnya kurikulum disempurnakan. Dalam hal ini Mulyani Sumantri (1998) mengingatkan bahwa tidak semua orang tua murid dapat dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum. Perlibatan itu perlu dilakukan secara selektif, dan pada tahapan proses kegiatan tertentu saja.

Sejalan dengan proses perjalanan reformasi politik, pada saat sekarang sistem pendidikan desentralisasi sudah mulai bergulir, bahkan beberapa universitas besar seperti UI, IPB, ITB dan UGM sudah mendapatkan otonomi pendidikan tinggi. Fenomena ini sangat menarik untuk dicermati dari kaca mata manajemen pendidikan tinggi. Dilihat dari sudut pandang pengembangan kurikulum, masing-masing universitas mendapat kesempatan untuk mengkreasi banyak bergantung kepada pemerintah pusat. Dengan kata lain, paradigma pengembangan kurikulum

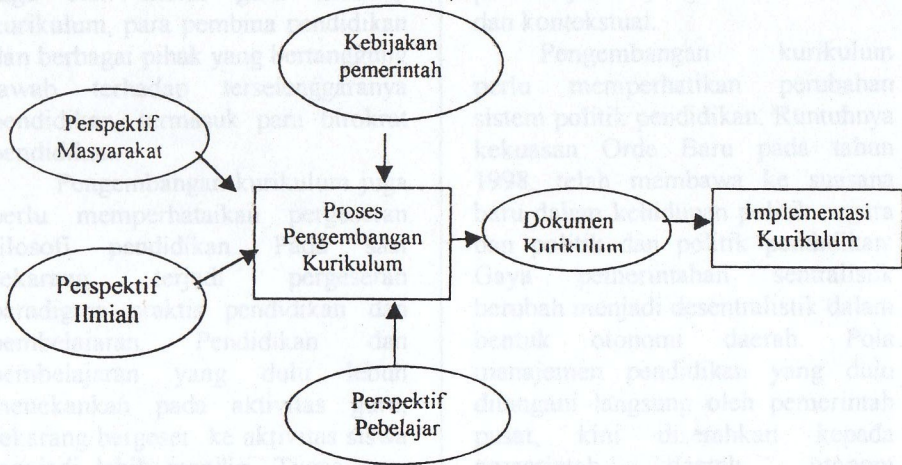
semestinya bergeser, dari model *top down* ke *grass roots*.

Top down model sering juga disebut administrasi (nana Syaodih Sukmadinata, 1997). Diberi nama model administratif karena inisiatif pengembangan datang dari administrasinya para administrator pendidikan (Dirjen, Direktur, Kepala Kanwil Pendidikan) membentuk suatu komisi untuk mengembangkan kurikulum. Model kurikulum yang demikian menurut Tilaar (2002) efektif untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan yang ada. Kurikulum yang ada merupakan pencerminan suatu hegemoni kebudayaan yang dihidupkan dan dipertahankan oleh rezim yang berkuasa. Kebebasan individu untuk bereksplorasi dan berkreaitivitas tidak ada. Kurikulum berfungsi sebagai bank data, bank soal dan bank pengalaman yang siap diindoktrinaskan kepada peserta didik melalui metode yang memaksa. Dalam kondisi yang demikian, pendidikan yang transformatif, yakni pendidikan yang mengedepankan interaksi dan dialog antara peserta didik dengan guru, maupun dengan dunia luarnya menjadi tidak ada. Atau kalau menurut Suyanto dan Djihad Hisyam (2000) pendidikan menjadi *Safetynet* bagi pelestarian kekuasaan.

Dalam pengembangan kurikulum model *grass roots*, seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru dari suatu sekolah. Bekerja sama dengan birokrasi

pemerintahan, ahli kurikulum, ahli pendidikan dan warga masyarakat menyelenggarakan kegiatan pengembangan kurikulum. Dengan demikian kurikulum yang dihasilkan menjadi bervisi keilmuan dan

kemasyarakatan. Karim A. Karhami (2000) menggambarkan sistem pengembangan kurikulum model *grass roots* dalam skema di bawah ini :



Gambar I. Pengembangan Kurikulum Model *Grass Rotts*.

Terkait dengan pengembangan kurikulum, Rencana Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 37 memberikan arahan sebagai berikut : (ayat 1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional; (ayat 2) kurikulum semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diivensifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi didik; (ayat 3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa, (b) peningkatan akhlak mulia, (c) peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) tuntutan dunia kerja, (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (h) agama, (i) dinamika perkembangan global, dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan setiap perubahan terjadi dalam lingkungan sekitar, regional maupun

internasional. Asean Free Area (AFTA) 2003 sebagai konsekuensi dari era global misalnya dan Millenium III merupakan abad informasi sesudah masa industri merupakan dua fenomena yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum pendidikan harus memikirkan bagaimana anak bangsa ini dapat bertahan hidup dalam persaingan antar bangsa yang sangat ketat. Tilaar (2002) menyatakan bahwa kurikulum yang tidak peka terhadap perubahan sosial akan mengakibatkan ketinggalan. Kurikulum pendidikan yang tidak memperhitungkan betapa pengaruh kemajuan teknologi informasi, arus demokrasi, perdagangan global yang terbuka, akan tercecer dari kehidupan masyarakat yang mengglobal. Salah satu ciri kehidupan yang mengglobal tersebut ialah terjadinya persaingan kerja sama antar bangsa. Kurikulum yang tidak mempertimbangkan persaingan antar bangsa tersebut, akan berfungsi sebagai agen pembodohan rakyat.

Agar produk dan proses pendidikan tidak menampilkan sesuatu yang tertinggi oleh laju perkembangan sains, teknologi dan kebutuhan masyarakat global, pada suatu waktu kurikulum perlu dievaluasi kelayakannya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, baru dapat ditentukan, apakah kurikulum perlu diubah atau diperbaiki. Keterlambatan perguruan dalam merespon berbagai macam perubahan, sering menyebabkan

lembaga tersebut menampilkan model pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang tidak relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Namun, dalam hal ini Nasution (1980) mengingatkan bahwa mengubah kurikulum bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Sebelum mengubah kurikulum hendaknya dilakukan penilaian terhadap kurikulum yang sedang dijalankan. Penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana kurikulum telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang ditampilkan oleh lulusan relevan dengan kebutuhan lapangan.

Baik tidaknya kurikulum dapat dilihat dari hasilnya, yakni : kedudukan, kehidupan, kinerja, kompetensi, dan prestasi kerja para lulusannya (Nasution, 1980). Bila lulusannya menduduki posisi-posisi penting dalam perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat, hal itu merupakan salah satu indikasi kurikulum pendidikan tersebut efektif. Sebaliknya, apabila para lulusan tersebut tidak memperoleh pekerjaan dan kedudukan yang signifikan dalam masyarakat, serta tidak mampu menampilkan kinerja yang baik. Tilaar (2002) mengatakan bahwa banyaknya penganggur terdidik yang diproduksi oleh lembaga pendidikan menjadi indikator tidak efektifnya kurikulum lembaga pendidikan tersebut. Namun, perlu disadari bahwa keefektifan kurikulum tidak semata-mata dapat ditentukan hanya berdasarkan hasil

evakuasi terhadap kompetensi lulusan. Pelaksanaan kurikulum dipengaruhi juga oleh moral guru terdapat kompetensi lulusan. Pelaksanaan kurikulum dipengaruhi juga oleh moral guru terhadap kurikulum, para pembina pendidikan dan berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pendidikan, termasuk para birokrat pendidikan.

Pengembangan kurikulum juga perlu memperhataikan pergeseran filosofi pendidikan. Pada saat sekarang terjadi pergeseran paradigma praktis pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran yang dulu lebih menekankan pada aktivitas guru, sekarang bergeser ke aktivitas siswa menjadi lebih mandiri. Tugas guru bukan memberikan ilmu kepada siswa, melainkan memotivasi, membantu, mempermudah dan menemani siswa agar dia terus mencari dan akhirnya dapat menemukan ilmu. Dengan demikian bobot ilmu tidak terletak pada hasil akhir (*final product*), melainkan pada proses metodologi atau cara mencarinya. Mengajar berarti membantu siswa untuk belajar (Mastuhu, 2003). Pembelajaran yang membentuk pola pikir konvergen, digeser ke pembelajaran yang lebih mengarah pada kemampuan berfikir divergen yang mengembangkan kreativitas siswa. Meill (dalam Mastuhu, 2003) menyatakan bahwa siswa akan memiliki kejujuran yang tinggi dan kecerdasan yang optimal

apabila dia diberi kemerdekaan untuk memilih dan menentukan jalannya sendiri dalam belajar. Pembelajaran yang menganut pola pikir *branking system*, harus di ubah ke pembelajaran yang konstruksivistik dan kontekstual.

Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan perubahan sistem politik pendidikan. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998, telah membawa ke suasana baru dalam kehidupan politik negara dan politik dan politik pendidikan. Gaya pemerintahan sentralistik berubah menjadi desentralistik dalam bentuk otonomi daerah. Pola manajemen pendidikan yang dulu ditangani langsung oleh pemerintah pusat, kini diserahkan kepada pemerintah daerah otonom (kabupaten), bahkan, sekarang berkembang pola pengembangan mutu pendidikan berbasis pada sekolah, di mana sekolah mendapat kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya berdasarkan potensi yang dimiliki. Sekolah mendapat keleluasaan untuk mengkeasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa depan. Dalam lingkup perguruan tinggi, otonomi kampus mulai ditumbuh-kembangkan dan tidak boleh bergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Pendidikan Tinggi memiliki tanggung jawab pada upaya pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Dengan demikian, kreativitas civitas akademika kampus

menjadi tumpuan bagi perkembangan suatu lembaga pendidikan.

Simpulan

Untuk mengakhiri karya tulis ini penulis menyampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Kurikulum dapat dimaknai secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, kurikulum diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi hasil belajar. Dalam pengertian ini tercakup kurikulum yang tertulis (*written curriculum*) maupun tidak tertulis (*hidden curriculum*). Dalam arti sempit, kurikulum hanya terdiri dari kurikulum yang tertulis saja.
2. Dalam konteks kurikulum, kompetensi berarti kemampuan yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan nilai yang akan dicapai setelah menyelesaikan suatu program studi.
3. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan program pengajaran yang mendasar diri pada kompetensi-kompetensi tertentu.
4. pengembangan kurikulum mempunyai dua makna, yakni menyusun kurikulum baru dan memperbaiki kurikulum yang sudah ada. Dalam pengembangan kurikulum perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat lokal, regional dan internasional. Selain itu juga mengacu pada pergeseran

paradigma filsafat dan politik pendidikan.

5. *Grass roots model* merupakan model pengembangan kurikulum yang sesuai dengan era otonomi pendidikan. pengembangan kurikulum dengan model ini melibatkan berbagai *stake holder* dalam menyusun atau memperbaharui kurikulum.

Daftar Pustaka

- Ali Imron. (2000). Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi untuk Memasuki Masa Depan; Sebuah Alternatif. *Makalah Seminar Nasional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2000*. Di Quality Hotel.
- Anik Gufron, (2003), model Pembelajaran yang Inovatif dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Majalah Kependidikan: Pelangi Pendidikan*, Vol. 4; No. 1; hlm. 18-30.
- Anonim. (2003). *Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Hasil Rapat Panitia Kerja Cisarua Bogor 2003*.

- Anonim. (2003). Menuntut Negara Meratifikasi Konvensi Hak-hak Minoritas. *Buletin Al Ikhtilaf*, edisi 184 12 Desember. Yogyakarta: LkiS.
- Ari Subagyo. (2003, Desember 18). Pentingnya Kurikulum Tersembunyi dlm Kampus Berbudaya. *Harian Kedauletatan Rakyat*, hlm.11.
- Depdiknas. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Taman Kanaak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah : Kebijakan Kurikulum*. Jakarta: Depdiknas.
- Brown, Nacino, R. dan Brow, Desmond, P. (1985). *Curriculum and Instruction*. Hongkong: Macmillan Publishers.
- Corsini, Raymond J. (1987). *Encyclopedia of Psychology*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Djemari Mardapi (2003). Kerangka Dasar Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Makalah Semiloka di UNY tanggal 24 dan 25 Oktober 2003*.
- Driyarkara. (1979). *Driyarkara Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hafid Abbas (2003). Menegakkan Dimensi HAM dalam Mereposisi arah Pendidikan Nasional. Dalam Sjafnistr Ronisef, dkk. (ED): *Mengurai Benang Kusut Pendidikan*. Yogyakarta: Transformasi.
- Hamdan Daulay. (2003, Desember 31). Memperbaiki Citra Depertemen agama. *Harian Kedauletatan Rakyat*, hlm. 10.
- Karim A. Karhami. (2000). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No.024, Th. 6, hlm. 281-294.
- Mastuhu. (2003). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Muchson, Ar. (2003, Mei 20). Reformasi Total dalam

- Pembelajaran. *Harian Kedaualatan Rakyat*, hlm. 11.
- Mukminan. (2003). Pengembangan Silabus Mata Kuliah Pengajaran Mikro dan PPL Berdasarkan KBK. *Makalah Seminar Pengembangan Silabus di UNY tanggal 8 Desember 2003*.
- Mulyani Sumantri. (1998). *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Depdikbud.
- Mulyasa. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (1997). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution. (1980). *Asas-asas Kurikulum*. Bandung: Jemmars.
- _____ (1993). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Said Hamid Hasan. (1988). *Evaluasi Kurikulum*. Jakarta : Depdikbud.
- Suyanto dan Djihad Hisyam (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Tilaar. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

*) Staf Pengajar FIP Universitas Negeri Yogyakarta